

PERBANASNews

No. 154 Tahun 2025 | Januari - Maret 2025

Outlook Ekonomi 2025

Membangun Ekonomi 2025 dengan Keuangan yang Stabil dan Inklusif

Perbankan Nasional Usulkan Dua Strategi demi Mendorong Kualitas Tenaga Kerja RI



Dorong Ketahanan Pangan, Kredit Sektor Pertanian dan Produk Hilir Butuh Insentif

Tantangan dan Peluang *Bullion Bank* dalam Memperkuat Industri Emas Nasional



PERBANASNews

No. 154 Tahun 2025
Januari - Maret 2025

PENERBIT

Perhimpunan Bank Nasional
(PERBANAS)

PELINDUNG

Badan Pengurus PERBANAS

REDAKSI

Anika Faisal
Aviliani

REDAKTUR PELAKSANA

Eka Sri Dana Afriza
Andry Asmoro
Enrico Tanuwidjaja

SIRKULASI

Wara Sri Indriani

Redaksi menerima tulisan dari
pihak luar. Panjang tulisan
3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN

Cover

Depan dalam dan belakang
dalam/luar berwarna

- 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

- 1 halaman: Rp4.000.000,00
- ½ halaman: Rp2.000.000,00

PERBANASNews menerima
pemasangan iklan dalam bentuk
laporan keuangan, display produk,
dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya PERBANAS Lantai 1
Jalan PERBANAS, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339
website: www.PERBANAS.org
e-mail: sekretariat@PERBANAS.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS

MENPEN No. 1882/SK/DITJEN
PPG/STT/1993,
2 September 1993

Sektor perbankan memiliki peran strategis sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain menjaga stabilitas sistem keuangan, perbankan juga mendorong berbagai agenda pembangunan. Salah satu kontribusinya adalah mendukung program penyediaan 3 juta rumah melalui pembiayaan perumahan yang inklusif, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengatasi *backlog* perumahan dan meningkatkan akses terhadap hunian layak.

Ketahanan pangan sebagai prioritas nasional juga diperkuat melalui penyaluran kredit ke sektor pertanian. Akses pembiayaan yang memadai bagi petani dan pelaku agribisnis menjadi kunci peningkatan produktivitas, penguatan rantai pasok pangan, dan stabilisasi harga pangan.

Perbankan juga berperan penting dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktivitas nasional. Melalui pembiayaan sektor riil seperti industri manufaktur, UMKM, dan jasa produktif lainnya, perbankan turut mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih kompetitif.

Memasuki 2025, sektor perbankan terus berinovasi dengan menghadirkan produk keuangan yang lebih beragam, termasuk diversifikasi investasi sesuai kebutuhan nasabah. Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah pengembangan Bullion Bank, yang berpotensi memperkuat industri emas nasional melalui peningkatan transparansi harga, efisiensi perdagangan, dan perluasan akses investasi berbasis emas.

Meski dihadapkan pada tantangan global, sektor jasa keuangan Indonesia tetap optimis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat stabilitas dan inklusivitas sistem keuangan, sejalan dengan prioritas pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Ke depan, penguatan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar perbankan dapat terus berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional dan menghadapi tantangan global secara adaptif.

Selamat membaca!

Daftar Isi

PERBANAS UTAMA

04 Perbankan Dorong Masyarakat Penghasilan Tanggung Masuk Kategori Penerima KPR Subsidi

Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai akan lebih terdorong dengan memperluas sasaran.



PERBANAS UTAMA

07 Dorong Ketahanan Pangan, Kredit Sektor Pertanian dan Produk Hilir Butuh Insentif

Selain memperkuat ketahanan pangan nasional, sektor ini juga dapat diandalkan untuk penciptaan lapangan kerja, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan karena itu dapat mengerem laju urbanisasi.



PERBANAS UTAMA

09 Perbankan Nasional Usulkan Dua Strategi demi Mendorong Kualitas Tenaga Kerja RI

PERBANAS merekomendasikan perlunya para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat bersama-sama mendorong pengembangan keterampilan dan kualitas pendidikan guna memperbaiki kualitas tenaga kerja di Indonesia.



ARTIKEL PERBANAS

- 11 Anak-anak di Ujung Jurang: Perjudian Online dan Masa Depan yang Suram
- 15 Tantangan dan Peluang Bullion Bank dalam Memperkuat Industri Emas Nasional
- 17 Membangun Ekonomi 2025 dengan Keuangan yang Stabil dan Inklusif

KEGIATAN



- Kelas Jurnalis PERBANAS Bekali Wartawan Materi Dasar Perbankan 20
- PERBANAS dan BI Sulut Buka Puasa Bersama dengan Puluhan Anak Panti Asuhan 22
- CEO Forum 23
- CFO Forum 23
- Kegiatan KOMITE MASYARAKAT PERBANKAN PEDULI (KMPP) PERBANAS 25

SUPLEMEN

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

PT Bank HIBANK Indonesia

21

Perbankan Dorong Masyarakat Penghasilan Tanggung Masuk Kategori Penerima KPR Subsidi

Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai akan lebih terdorong dengan memperluas sasaran. Jadi, KPR subsidi tak hanya sekadar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), juga masyarakat menuju kelas menengah atau masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Ekonom Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) Winang Budoyo mengatakan selama ini kendala program 3 juta hunian adalah pembiayaan subsidi yang masih fokus pada MBR dengan dengan pengeluaran bulanan Rp3–7 juta per rumah tangga atau pendapatan minimal Upah Minimum Regional (UMR).

Padahal, ada kelas MBT yang juga memiliki kebutuhan untuk rumah tetapi kemampuannya masih terbatas. "Kelas ini [MBT] sebetulnya berpotensi, tapi terkendala mengingat mereka tidak dianggap miskin sehingga tak bisa ambil KPR subsidi, di sisi lain mereka juga tidak dianggap orang kaya," kata Winang dalam diskusi PERBANAS, dikutip Jumat (7/2/2025).

Winang yang juga ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menegaskan perlu ada rancangan aturan agar bisa memasukkan kelompok MBT dengan skema pembiayaan yang sesuai kemampuan membayar (*ability to pay*) dan desain penerima manfaat yang tepat sasaran.

Selain itu, secara prosedural, mengingat mayoritas masyarakat bekerja pada sektor informal, maka perlu ada verifikasi alternatif selain slip gaji untuk mengakses KPR subsidi. Verifikasi alternatif ini penting untuk mengukur kemampuan membayar masyarakat dengan data yang kredibel, seperti tagihan listrik rumah. "*Sharing database* antara pemerintah dan perbankan diperlukan," katanya.

Mengacu data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), fasilitas subsidi perumahan yang berjalan ialah **FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan)** dan **TAPERA (tabungan perumahan rakyat)**.

Secara nasional pada 2023 ada 220.000 unit subsidi yang diberikan, tahun 2024 ada 166.000 unit dengan *backlog* perumahan mencapai 12,7 juta rumah dengan pertumbuhan 700.000-800.000 per tahun. Dengan target nol *backlog* saat Indonesia Emas di tahun 2045, maka diperkirakan penyediaan rumah 1,5 Juta unit per tahun.



Kajian PERBANAS juga sudah merekomendasikan agar pemerintah meninjau ulang batasan besaran penghasilan masyarakat yang berhak menerima subsidi rumah sebesar Rp8 juta dan Rp10 juta (khusus Papua) sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023. "Ini mengingat ada kelompok MBT dengan rentang penghasilan di atas MBR yang juga kesulitan membeli rumah," kata Winang.

Sebelumnya dalam CEO Forum PERBANAS-IBI, Rabu (22/01/2025), Ketua Umum PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo mengapresiasi Program 3 Juta Rumah yang menyasar MBR yang diyakini dapat mengatasi *backlog* perumahan.

"Untuk itu, penting bagi pemerintah memastikan cicilan rumah yang terjangkau atau sesuai dengan kemampuan bayar MBR, yakni kisaran Rp1,1 juta per bulan," kata Wakil Menteri BUMN ini. "Dengan subsidi yang tepat sasaran dan dukungan penuh perbankan dan pengembang hunian, program ini diharapkan bisa memberikan solusi nyata bagi masalah perumahan di Indonesia," katanya.

Tabel 4.2 Program Pembangunan Perumahan Rakyat

Periode Kepemimpinan	Nama Program
Soeharto	<i>Kampung Improvement Program</i>
	Program Rumah Susun
	Program Pemukiman dan Perumahan Desa (P3D)
Megawati Soekarnoputri	Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR)
Susilo Bambang Yudhoyono	Pembangunan Berbasis Masyarakat Indonesia
	Program 1.000 Tower
	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
Joko Widodo	Program Sejuta Rumah
	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
	Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)
Prabowo Subianto	Program 3 Juta Rumah
	Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)

Sumber: Herdiyanto (2023)





STIMULUS 185 SEKTOR LAINNYA

Winang mengatakan Program 3 Juta Rumah akan menggerakkan sektor usaha lain dan dapat diandalkan sebagai lokomotif pertumbuhan. *Multiplier effect* menetes hingga 185 sektor lain dalam ekosistem ini. Mulai dari industri skala besar seperti industri semen hingga usaha paling hilir level UMKM seperti jaringan toko material.

Sebab itu, guna mendukung program ini, pemerintah perlu menjaga daya beli dan mempertahankan harga tanah/hunian pada tingkat wajar. "Pemerintah juga perlu melanjutkan intervensi jangka pendek dalam pemberian subsidi program seperti FLPP, insentif pajak seperti PPN DPT atau ditanggung pemerintah, dan disinsentif pajak bagi yang melakukan spekulasi pada tanah atau hunian," kata Winang.

PERBANAS pun mengimbau agar pemerintah perlu meningkatkan alokasi subsidi perumahan tiga kali lipat dari tahun 2024. Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu mengarahkan pemerataan distribusi populasi dan arus urbanisasi agar tersebar lebih merata di berbagai kota-kota besar, tak hanya terpusat di Jawa apalagi Jabodetabek.

Dalam kesempatan yang sama, Enrico Tanuwidjaja, Ekonom PERBANAS dan Bank UOB Indonesia, menambahkan bahwa pemerintah perlu mendorong produktivitas sehingga daya beli masyarakat meningkat. Hal ini penting demi mendorong permintaan alias *demand side*.

"Kebijakan pemerintah saat ini fokus pada *supply side*, bukan pada *demand side*. Misalnya pembangunan 3 juta rumah, ini *supply side*, siapa yang akan membeli. Sebab itu, kita mesti mendorong produktivitas, daya beli," jelasnya.

Secara nasional pada 2023 ada 220.000 unit subsidi yang diberikan, tahun 2024 ada 166.000 unit dengan backlog perumahan mencapai 12,7 juta rumah dengan pertumbuhan 700.000–800.000 per tahun.

"Beberapa sektor yang mesti menjadi perhatian pemerintah dan perbankan ke depan yakni pertanian. Sektor lainnya yakni konstruksi, properti, *real estate*, logistik dan transportasi yang perlu didukung juga oleh perbankan."

Sebelumnya, sebagai bagian dari kesuksesan Program 3 Juta Rumah ini, pada 8 Januari lalu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sudah meneken *Memorandum of Understanding* (MoU) Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit dengan investor perumahan Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani, disaksikan Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta.

Dorong Ketahanan Pangan, Kredit Sektor Pertanian dan Produk Hilir Butuh Insentif

Pelaku industri perbankan nasional menilai peran sektor pertanian sebagai motor penggerak ekonomi perlu ditingkatkan lagi. Selain memperkuat ketahanan pangan nasional, sektor ini juga dapat diandalkan untuk penciptaan lapangan kerja, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan karena itu dapat mengerem laju urbanisasi.



Penguatan sektor ini dapat dilakukan melalui pemberian insentif untuk kredit sektor pertanian dan pengembangan produk hilir.

Rekomendasi ini menjadi satu dari tiga inisiatif strategis yang disampaikan oleh Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), termasuk kepada pemerintah. Dua lainnya yakni penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Ketua Umum PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo, yang juga Wakil Menteri BUMN, mengatakan inisiatif-inisiatif strategis itu digagas guna memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di tengah ketidakpastian global.

"Peran sektor pertanian sebagai motor ekonomi perlu ditingkatkan melalui pemberian insentif bagi kredit sektor pertanian dan pengembangan produk hilir. Selaras dengan itu, kami menekankan pentingnya Indonesia membangun sistem data pertanian terintegrasi demi meningkatkan akses

informasi bagi pelaku usaha dan perbankan," katanya, dalam pernyataan resmi di CEO Forum PERBANAS-IBI, Rabu (22/01/2025) di Jakarta.

PERBANAS juga menekankan perlunya mendorong produktivitas sejumlah komoditas pangan prioritas agar bisa mengurangi ketergantungan impor seperti padi, jagung, ikan, daging (ayam dan sapi), sawit, kelapa, kopi, dan tebu.

Berdasarkan dokumen Outlook PERBANAS 2025 bertajuk **"Banking Beyond Growth: Powering a Sustainable and Inclusive Economy for 2025 Onward"**, selama ini sektor pertanian memang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Pada 2023, sektor pertanian (*on farm*) menyumbang 12,53% terhadap total PDB nasional, naik 0,13% dari tahun sebelumnya. Jika ditambah dengan sektor-sektor lain yang berbasis pertanian (*off farm*), kontribusinya naik menjadi 26,36%. Sumbangan ini menunjukkan peran penting sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama dalam ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja, dan mendukung ekspor.

Tabel 3.1 Sumbangan Kategori Pertanian Terhadap Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 2019-2023 (%)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		12,71	13,70	13,28	12,40	12,53
	Pertanian, Peternakan, Pemburuan, dan Jasa Pertanian	9,40	10,20	9,85	9,22	9,25
	Tanaman Pangan (3)	2,82	3,07	2,60	2,32	2,26
	Tanaman Hortikultura (5)	1,51	1,62	1,55	1,44	1,37
	Tanaman Perkebunan (1)	3,27	3,63	3,94	3,76	3,88
	Peternakan (4)	1,62	1,69	1,58	1,52	1,56
	Jasa Pertanian dan Perburuan (7)	0,19	0,20	0,19	0,18	0,18
	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,66	0,70	0,66	0,60	0,62
	Perikanan	2,65	2,79	2,77	2,58	2,66

sumber: BPS 2019 - 2023 (diolah)

Dalam kesempatan CEO Forum tersebut, Wakil Ketua Umum PERBANAS dan Presiden Direktur Superbank Indonesia, Tigor M. Siahaan, mengatakan ketahanan pangan penting menjadi perhatian bersama sektor perbankan. Hal yang sama juga disampaikan Enrico Tanuwidjaja, ekonom PERBANAS dan Bank UOB Indonesia.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen membangun ketahanan pangan yang tidak hanya mengejar peningkatan produksi tapi juga mendorong industrialisasi sektor pertanian dan pengembangan ekonomi pedesaan. Gagasan yang baik ini tentu kita perlu dukung," kata Tigor.

"Beberapa sektor yang mesti menjadi perhatian pemerintah dan perbankan ke depan yakni pertanian yang porsi kreditnya rendah sehingga bank perlu jemput bola," kata Enrico.

"Memang diakui, sektor pertanian itu kontribusinya baru 7,16% terhadap *outstanding* penyaluran kredit," tambah Aviliani, Ketua Bidang Pengembangan Kajian Ekonomi dan Perbankan PERBANAS, dalam kesempatan tersebut.

DELAPAN SEKTOR KOMODITAS

Bayu Krisnamurthi, ekonom dan akademisi pertanian Indonesia, yang menjadi salah satu pembicara lain dalam CEO Forum itu juga merekomendasikan agar perbankan nasional dapat mencontoh kesuksesan kredit di sektor kelapa sawit.

"Contoh kisah sukses penyaluran kredit ke sektor sawit di Indonesia yakni di tahun 1985-1990, jumlah lahan sawit paling besar itu hanya 300.000 hektare, kini sudah 16 juta hektare," kata Direktur Utama Perum Bulog 2023-2024 itu. "Pertumbuhan sektor sawit saat itu tidak ada fasilitas pemerintah, tidak ada subsidi, semua dukungan dari perbankan."

Bayu menegaskan kisah sukses penyaluran kredit ke sawit itu dapat dicontoh untuk sektor-sektor pertanian lain, misalnya gandum, kedelai, dan padi. "Tapi perspektifnya dan pertimbangannya itu tidak dipisah ya, artinya [dukungan kredit ke] hulu dan hilir."

Tapi Bayu menegaskan tenor menjadi salah satu perhatian. "Saran buat perbankan, jadi tenor pembiayaan juga bisa jadi pertimbangan antara 8-10 tahun. Kemudian rencana kebijakan bank juga janganlah mengacu pada politik yang biasanya cuma bertahan 5 tahun lalu ganti lagi."

Mengacu rekomendasi dokumen *Outlook* PERBANAS 2025, terdapat delapan komoditas pertanian strategis yang menjadi prioritas pemberian kredit perbankan, yakni padi, jagung, ikan (tongkol, tuna dan cakalang), daging (ayam dan sapi), sawit, kelapa, kopi dan tebu (gula) serta dua komoditas input pertanian yaitu pupuk (Urea dan NPK) dan benih.

"Delapan komoditas ini dengan berbagai produk hilirisasinya memiliki nilai bisnis setidaknya US\$23,15 miliar atau setara Rp 370 triliun setahun (*underestimate*)," tulis dokumen PERBANAS tersebut

PERBANAS menilai, pemberian kredit dapat menasar pelaku usaha pertanian terkait komoditas-komoditas tersebut, baik ditingkat usaha tani (*on farm/upstream*), industri barang setengah jadi (*midstream*) dan industri barang jadi (*downstream*).

"Demi mewujudkan ketahanan pangan dan menopang target pertumbuhan 8%. Hal ini perlu ditopang dengan peningkatan kapasitas bank dalam memahami siklus bisnis sektor pertanian dan menilai kredit pertanian," tulis PERBANAS.

Perbankan Nasional Usulkan Dua Strategi demi Mendorong Kualitas Tenaga Kerja RI

Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) merekomendasikan perlunya para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat bersama-sama mendorong pengembangan keterampilan dan kualitas pendidikan guna memperbaiki kualitas tenaga kerja di Indonesia.



PERBANAS menilai, meskipun kuantitas lapangan kerja meningkat 3,3 juta per tahun atau naik dari 122 juta orang pada 2015 menjadi 152 juta pada 2024, tetapi kualitas pekerjaan masih terbatas.

Apalagi pandemi COVID-19 juga makin memperburuk situasi, tercermin dari per-tumbuhan lapangan kerja formal yang lebih rendah dari lapangan kerja informal.

Mengacu dokumen *Outlook* PERBANAS 2025 bertajuk **"Banking Beyond Growth: Powering a Sustainable and Inclusive Economy for 2025 Onward"**, lapangan kerja informal bertambah 17,5 juta orang selama 2015-2024, berbanding ketersediaan total lapangan kerja formal yang hanya bertambah 12,3 juta orang.

"Ketimpangan kesejahteraan masyarakat juga melebar, di mana selisih penghasilan pekerja formal dan informal meningkat hampir dua kali lipat. Sebab itu, kami mendorong pengembangan keterampilan dan kualitas pendidikan," kata Ketua Umum PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo, dalam pernyataan resmi di CEO Forum PERBANAS-IBI, Rabu (22/01/2025).

Kartika yang juga Wakil Menteri BUMN ini mengatakan perlunya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan perbankan serta menguatkan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam menghadapi ketidakpastian ini, termasuk fokus pada kualitas tenaga kerja.

"Pemerintah juga perlu memperkuat ekonomi domestik dengan mengoptimalkan berbagai sektor untuk menjaga daya tahan perekonomian," katanya.

PERBANAS, dokumen *Outlook* 2025, mengungkapkan sektor yang berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dalam 10 tahun terakhir adalah akomodasi dan pengadaan makan minum (20,2%), perdagangan besar dan eceran (20,1%), industri pengolahan (15%), dan pertanian (10,1%).

Tabel 2.2 Perkembangan Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Tingkat Pengangguran 2015-2024 (juta orang)

Tahun	Setengah Pengangguran (a) juta orang	Pekerja Paruh Waktu (b) juta orang	Pekerja Tidak Penuh (c=a+b) juta orang	Share (a)/ Penduduk Bekerja	Share (b)/ Penduduk Bekerja	Share (c)/ Penduduk Bekerja
2015	9,7	24,6	34,3	8,5%	21,4%	29,9%
2015	8,1	28,5	36,6	6,4%	22,5%	29,0%
2020 (COVID-19)	13,1	33,3	46,4	46,4%	10,2%	26,0%
36,1%	11,6	34,6	46,2	8,0%	23,9%	31,9%
Perubahan 2015-2004	18,7%	40,9%	34,6%	-0,5%	2,5%	2,1%

Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

Namun lapangan kerja yang tersedia dari keempat sektor itu mayoritas pekerjaan informal. Berdasarkan analisis deskriptif periode 2015-2024, PERBANAS memetakan sembilan sektor strategis yang perlu menjadi perhatian perbankan, karena berkontribusi atas lapangan kerja dan berpotensi mendorong transisi pekerjaan informal ke formal.

Kesembilan sektor itu yakni penyediaan akomodasi dan makan-minum, konstruksi, jasa pendidikan, pertambangan, informasi dan komunikasi, transportasi dan pergudangan, perdagangan, industri pengolahan dan pertanian (arti luas).

Oleh sebab itu, PERBANAS menegaskan pembiayaan kredit modal kerja dan investasi ke sektor-sektor tersebut memiliki peran dalam mendorong penciptaan lapangan kerja.

SUPPLY AND DEMAND

Lebih lanjut, dokumen *Outlook* PERBANAS 2025 merekomendasikan dua hal demi mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja yakni strategi *supply* dan *demand*.

Dari sisi suplai yakni fokus pada pengembangan keterampilan (*skills development*) dan peningkatan kualitas pendidikan serta pelatihan, di antaranya *link and match* antara pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan industri menjadi suatu keniscayaan.

Selain itu, optimalisasi program pemerintah seperti Kartu Prakerja, pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan lainnya yang fokus pada reskilling dan upskilling juga penting.

Berikutnya perlu perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh, berorientasi pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) baik formal maupun non-formal, dan pemanfaatan peluang penempatan pekerja migran (PMI) terampil ke luar negeri.

Untuk *demand*, strateginya yakni menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan kondusif, insentif fiskal (*tax holiday, tax allowance, super tax deduction*) harus diarahkan kepada industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.

Strategi lain, sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi pertambangan, energi terbarukan, dan semikonduktor dapat terus didorong, lalu peningkatan produktivitas secara

sistemik, dan terakhir kebijakan mendorong UMKM bertransformasi menjadi formal, baik melalui insentif pembiayaan (akses KUR), legalitas mudah (Nomor Induk Berusaha/NIB di OSS), atau kemitraan dengan perusahaan besar dalam skema rantai pasok yang terintegrasi.

"Contoh, dengan NIB yang terintegrasi, perbankan dapat menilai profil risiko UMKM secara lebih akurat. Klasterisasi usaha akan memudahkan pengelolaan risiko dan pengembangan skema penjaminan kredit," tulis PERBANAS.

Terkait dengan persoalan tenaga kerja ini, Dalam CEO Forum PERBANAS-IBI itu, peneliti dan Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan periode 2019 - 2024 M. Reza Hafiz Akbar, yang menjadi pembicara, mengatakan tiga hal yang perlu jadi perhatian soal bonus demografi : SDM, lapangan kerja yang berkualitas, dan akumulasi kapital.

"Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan lapangan kerja lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja. Tapi yang perlu diwaspadai adalah gap keterampilan angkatan kerja," katanya.

Saat ini, katanya, pekerja informal mendominasi sebanyak 60%, sisanya formal 40%. "Jika melihat pertumbuhan tanpa menghitung adanya pandemi, maka biasanya sektor formal lebih tinggi. Covid-19 itu mereset kenormalan ini yang membuat pekerja sektor informal dominan," katanya.

Sebab itu, dia juga merekomendasikan beberapa hal terkait dukungan perbankan, terutama tiga sektor yang berpotensi menyerap pekerja formal yakni pertambangan, konstruksi, dan transportasi. "Tiga sektor ini bisa didorong, termasuk oleh sektor perbankan, agar mereka bisa menyerap tenaga kerja," kata Reza.

Selain itu, perlu adanya dorongan proporsi kredit ke usaha menengah, tidak hanya ke mikro. "Perlu ada dukungan semua pihak termasuk bank untuk mendorong UMKM naik kelas, bukan hanya tugas pemerintah."

Dalam kesempatan itu, Aviliani, Ketua Bidang Pengembangan Kajian Ekonomi dan Perbankan PERBANAS, menilai dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, bukan tugas perbankan, tetapi sektor riil. "Dengan demikian, kebijakan sektor riil yang positif diperlukan, jadi bank bisa *follow the business*."

Anak-anak di Ujung Jurang: Perjudian *Online* dan Masa Depan yang Suram

Delapan puluh ribu anak adalah jumlah yang sangat besar. Sejumlah itulah anak di bawah usia 10 tahun yang menjadi pemain judi *online*, sebagaimana diungkapkan oleh PPATK bulan Juli 2024 lalu. Ini berarti anak yang rata-rata belum mencapai kelas 5 SD sudah terpapar pada perbuatan yang berisiko membahayakan bukan saja ekonomi, tetapi juga kejiwaan sang anak di masa depan.

Di sebuah lingkungan dengan sedikit pilihan hiburan fisik, anak-anak mulai mencari alternatif di dunia digital. Salah satu pilihan yang mereka temukan adalah *game* yang mengandung elemen perjudian. Mereka sering melihat iklan judi *online* dan elemen perjudian dalam *game* yang mereka mainkan. Iklan-iklan ini, yang muncul berulang kali, membuat perjudian terasa seperti sesuatu yang normal dan menarik. Anak-anak, yang terbiasa dengan paparan tersebut, akhirnya mulai berpikir bahwa perjudian adalah bagian dari kehidupan sehari-hari.

Saat mereka melihat teman-teman mereka bermain *game* dengan elemen judi, mereka merasa terdorong untuk ikut serta agar bisa diterima dalam kelompok. Teman sebaya memiliki pengaruh besar dalam keputusan mereka, dan untuk merasa diterima, mereka pun mencoba permainan yang sama. Begitu mereka mulai bermain, anak-anak merasa senang ketika mendapatkan kemenangan kecil, meskipun hadiah tersebut hanya bersifat sementara. Kemenangan kecil ini memberikan rasa puas yang langsung, mendorong mereka untuk terus bermain dengan harapan bisa mendapatkan lebih banyak.



Namun, semakin mereka bermain, semakin mereka terjebak dalam pola yang sulit untuk dipahami. Anak-anak ini terus bermain judi *online*, semakin terfokus pada hadiah instan yang mereka dapatkan, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya terus kehilangan uang. Meskipun risiko yang ada semakin besar, mereka terus mengejar kemenangan-kemenangan kecil yang membuat mereka merasa puas sementara, mengabaikan kerugian yang terus terjadi. Mereka lebih fokus pada kenikmatan sesaat daripada memahami konsekuensi jangka panjang dari perilaku mereka.

Begitulah, tanpa disadari, anak-anak ini mulai terjebak dalam lingkaran perjudian *online* yang semakin sulit untuk dihentikan. Studi di Ghana (Glozah et al., 2021; Kyei-Gyamfi et al., 2022) maupun studi yang dilakukan oleh UNICEF (2021) secara global mengungkapkan dampak buruk dari perjudian *online* pada anak-anak yang melakukannya. Perjudian *online* pada anak-anak memberikan dampak yang merusak, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun akademis. Anak-anak yang terlibat dalam perjudian *online* sering kali menjadi kecanduan. Mereka merasa terdorong untuk terus berjudi meskipun telah mengalami kerugian, dengan harapan untuk memulihkan kerugian tersebut. Kecanduan ini membuat mereka terjebak dalam pola perilaku yang semakin merugikan. Salah satu dampak terburuk adalah ketika anak-anak mulai mencuri uang dari keluarga mereka untuk membiayai kebiasaan berjudi. Keputusan ini tidak hanya merusak hubungan keluarga, tetapi juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas ilegal.

Selain itu, anak-anak yang sering kalah dalam perjudian akan merasakan kecemasan dan depresi. Perasaan frustrasi ini muncul setiap kali mereka merasa gagal atau kehilangan uang, yang berpengaruh pada kesehatan mental mereka. Ketegangan emosional ini bisa berkembang menjadi gangguan yang lebih serius, mempengaruhi kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Gejala depresi yang muncul sering kali mengganggu kesejahteraan mereka, menjauhkan mereka dari aktivitas sosial yang sehat dan memperburuk kondisi mental mereka.

Perjudian *online* juga berimbas besar pada kehidupan akademis anak-anak. Anak-anak yang kecanduan berjudi sering kali mengalami penurunan performa akademik. Mereka cenderung tidak fokus di sekolah, mengabaikan tugas dan pelajaran karena khawatir dengan perjudian yang mereka lakukan. Kecemasan mengenai permainan dan kerugian yang mereka alami membuat mereka sulit untuk berkonsentrasi di kelas. Lebih parah lagi, beberapa anak memilih untuk tidak masuk sekolah sama sekali, lebih memilih menghabiskan waktu bermain *game* judi *online*. Ketidakhadiran ini menyebabkan mereka tertinggal dalam pelajaran dan menghambat perkembangan akademis mereka.



Pada tahun 2013, sebuah tim peneliti internasional yang disponsori oleh *Ontario Problem Gaming Research* telah merumuskan kerangka konseptual perjudian yang berbahaya (*Conceptual Framework of Harmful Gambling*). Kerangka konseptual ini terdiri dari 19 faktor spesifik perjudian dan 23 faktor umum. Jumlah ini bermakna kalau judi memang merupakan fenomena yang kompleks, melibatkan 42 faktor yang saling jalin menjalin dan perlu dialamatkan untuk menghapus judi seutuhnya.

Menurut kerangka konseptual ini, ada dua kelompok faktor yang mempengaruhi perjudian secara umum: faktor spesifik perjudian dan faktor umum. Faktor spesifik perjudian mencakup lingkungan perjudian (ekonomi makro, ekonomi mikro, lingkungan sosio-politik, lingkungan korporat, budaya tanggungjawab sosial, ketersediaan pilihan hiburan, dan kebijakan publik), paparan perjudian (aksesibilitas, konteks, latar perjudian, dan adaptasi), tipe perjudian (frekuensi dan *arousal event*, kecakapan dan persepsi kecakapan, dan sosiabilitas), dan sumberdaya perjudian (pencegahan, reduksi *harm*, bantuan bersama, perawatan, bantuan mandiri, dan persepsi pemecahan masalah). Faktor umum mencakup faktor budaya (etnisitas dan tradisi, sikap sosial-budaya, sub-budaya perjudian, agama dan sistem kepercayaan lainnya, representasi dan simbolisme, dan jender), faktor sosial (demografi sosial, sistem pendidikan, keluarga dan keterlibatan teman, lingkungan sosial sekitar, stigmatisasi, dan penyimpangan), faktor psikologis (kepribadian dan temperamen, perkembangan sepanjang usia, penilaian dan pengambilan keputusan, gaya koping, gangguan ko-morbid, kesejahteraan subjektif, persepsi diri, dan pembelajaran sosial), dan biologi (warisan genetik, neurobiologi, dan jenis kelamin).

Dari sekian banyak faktor tersebut, ada sejumlah faktor yang sangat lekat dengan anak-anak. Faktor-faktor ini membuat mereka terpicu oleh judi *online*. **Pertama**, faktor aksesibilitas dan konteks. Anak-anak lebih mudah terpapar perjudian *online* karena aksesibilitas yang tinggi melalui perangkat seperti *smartphone*, tablet, atau komputer. Perjudian sering kali hadir dalam bentuk permainan digital yang tidak terlihat seperti perjudian tradisional, sehingga konteksnya disamarkan. Iklan yang muncul di media sosial atau *game* dengan elemen perjudian seperti *loot box* menciptakan pengalaman serupa perjudian yang memikat anak-anak.

Kedua, faktor frekuensi dan *arousal event*. Platform judi *online* dirancang dengan elemen *arousal* (misalnya, grafik mencolok, suara kemenangan) untuk menarik perhatian anak-anak. Selain itu, frekuensi interaksi tinggi melalui sistem bonus harian atau permainan cepat membuat mereka terus terlibat. Anak-anak tertarik dengan aspek hiburan dan hadiah instan, tanpa menyadari risiko finansial yang terkait.

Ketiga, ketersediaan pilihan hiburan. Kurangnya alternatif hiburan yang sehat atau menarik bagi anak-anak di lingkungan mereka dapat membuat perjudian *online* menjadi salah satu pilihan utama untuk mengisi waktu luang. Di wilayah dengan keterbatasan fasilitas bermain fisik, anak-anak mungkin lebih cenderung menghabiskan waktu di dunia digital.

Dalam kelompok faktor umum, sikap sosial-budaya dan representasi simbolik memiliki peran penting. Representasi perjudian sebagai bentuk hiburan yang normal dalam budaya populer, terutama melalui media dan iklan, dapat memengaruhi persepsi anak-anak terhadap aktivitas ini. Iklan yang menyamakan perjudian sebagai "*game*" dengan hadiah menarik dapat membuat anak-anak menganggapnya sebagai aktivitas yang menyenangkan dan bebas risiko.

Faktor sosial yang paling berperan dalam judi *online* di kalangan anak-anak adalah keluarga dan keterlibatan teman. Peran keluarga dan teman sangat penting. Jika orang tua atau teman terlibat dalam perjudian (baik *online* maupun *offline*), anak-anak mungkin meniru perilaku tersebut melalui pembelajaran sosial. Anak-anak yang melihat orang tua bermain judi *online* mungkin menganggapnya sebagai aktivitas yang wajar. Teori belajar sosial menjelaskan faktor keluarga dan keterlibatan teman. Selain keluarga dan teman, *influencer* media sosial juga berpengaruh. Seorang anak yang melihat *influencer* favoritnya mempromosikan situs judi *online* cenderung menganggapnya aman dan menarik. Dikembangkan oleh Albert Bandura, teori ini menyatakan bahwa individu belajar melalui pengamatan dan imitasi terhadap orang lain, terutama dari model yang dianggap menarik atau relevan. Anak-anak meniru perilaku orang tua, teman, atau *influencer* yang bermain judi *online*.

Pengamatan terhadap model ini memengaruhi keputusan mereka untuk mencoba perjudian.

Dalam kaitannya dengan psikologi anak, penilaian keputusan memiliki peran yang penting. Anak-anak berada pada tahap perkembangan di mana kemampuan mereka untuk menilai risiko belum matang. Teori pengolahan informasi memberikan penjelasan tentang faktor penilaian keputusan. Teori ini berfokus pada bagaimana individu, terutama anak-anak, memproses, menyimpan, dan mengambil informasi dari lingkungan mereka. Anak-anak, karena keterbatasan perkembangan kognitif, lebih mudah tertipu oleh mekanisme perjudian. Mereka tidak memahami peluang menang yang kecil atau risiko kerugian finansial.

Aspek biologi anak yang paling dominan dalam mendorongnya terlibat dalam judi *online* adalah neurobiologi dan perkembangan otak. Sistem otak anak-anak, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengendalian *impuls*, belum sepenuhnya berkembang. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap *reward system* yang dieksploitasi oleh platform judi *online*. Ketika anak-anak menerima hadiah kecil dari permainan, pelepasan dopamin menciptakan rasa senang yang mendorong mereka untuk terus bermain.

Tanpa penanganan yang tepat, kebiasaan judi *online* pada anak-anak dapat mengarah pada masalah yang lebih besar, merusak kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Perjudian *online* bukan hanya masalah hiburan, tetapi juga ancaman nyata yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak yang terjebak di dalamnya. Sejumlah langkah perlu diambil oleh para *stakeholder*.

Iklan perjudian *online*, elemen judi dalam *game* (seperti *loot box*), dan akses mudah ke platform digital menempatkan perjudian sebagai sesuatu yang relevan di benak anak-anak. Media menentukan bahwa perjudian adalah "topik penting" melalui paparan berulang. Karena itu, Pemerintah perlu mengatur dan membatasi iklan perjudian yang menargetkan anak-anak melalui media digital. Ini termasuk melarang pengiklanan perjudian dalam *game* atau aplikasi yang sering dimainkan oleh anak-anak. Tindakan ini akan menghindari normalisasi perjudian di kalangan anak-anak dan memastikan bahwa perjudian tidak *diframing* sebagai hiburan yang menyenangkan.

Frekuensi permainan judi *online* yang cepat membuat anak-anak mudah kecanduan. Perkembangan otak anak-anak yang belum matang, terutama di bagian pengendalian impuls, membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh *reward system* yang dioptimalkan oleh perjudian *online*. Orang tua memiliki tanggungjawab yang besar disini. Mereka harus menggunakan perangkat pengawasan dan kontrol untuk membatasi akses anak-anak ke aplikasi dan *game* yang mengandung elemen perjudian. Ini termasuk memantau aktivitas mereka di perangkat digital. Langkah ini akan mengurangi paparan anak terhadap mekanisme perjudian



yang merangsang kecanduan, seperti *loot box* dan hadiah instan yang ada dalam banyak *game*.

Representasi perjudian sebagai hiburan normal di media digital menanamkan pandangan bahwa perjudian adalah aktivitas umum dan tidak berbahaya. Sekolah harus mengintegrasikan pendidikan literasi media dan digital yang mencakup pemahaman tentang bagaimana media bisa memengaruhi perilaku dan pandangan dunia, termasuk normalisasi perjudian. Langkah ini akan membantu anak-anak memahami bahwa perjudian *online* tidak selalu dapat dipercaya dan mengajarkan mereka cara mengidentifikasi *framing* yang bisa menyesatkan.

Perjudian *online* diframing sebagai hiburan menarik dalam situasi dengan sedikit alternatif, menjadikannya terlihat sebagai pilihan yang layak untuk mengisi waktu luang. Pengembang *game* perlu merancang *game* yang tidak mengandung elemen. Mereka juga harus memastikan bahwa *game* tidak merangsang kecanduan atau mendorong perilaku berisiko. Langkah ini akan mengurangi potensi kecanduan dan risiko psikologis terkait perjudian *online*, serta

memastikan bahwa *game* yang dihasilkan sesuai dengan usia pengguna.

Anak-anak yang melihat banyak teman mereka bermain *game* judi *online* atau membicarakannya mungkin merasa tertekan untuk ikut mencoba, terutama jika judi tersebut dikaitkan dengan popularitas atau persahabatan. Masyarakat dan organisasi non-pemerintah perlu membuat kampanye kesadaran yang mengedukasi orang tua dan anak-anak tentang dampak perjudian *online*, serta mengajak mereka untuk berbicara terbuka tentang masalah ini di lingkungan sosial mereka. Tindakan ini akan mengatasi fenomena spiral keheningan di mana anak-anak atau orang tua mungkin merasa enggan untuk berbicara tentang masalah perjudian karena tabu atau stigmatisasi.

Singkatnya, kita telah memiliki kerangka teoritis maupun pemahaman yang cukup mendalam tentang bagaimana judi *online* dapat mempengaruhi dan memberikan dampak jangka panjang pada anak-anak. Para *stakeholder* perlu bekerjasama untuk mengatasi masalah ini. Narasi yang kami kembangkan ini memberikan langkah dan justifikasi teoritis dari langkah tersebut untuk mengatasi kecanduan judi *online* pada anak-anak di Indonesia.

Oleh Dana Afriza

Referensi

Abbott, M., Binde, P., Hodgins, D., Korn, D., Pereira, A., Volberg, R., & Williams, R. (2013). *Conceptual framework of harmful gambling: An international collaboration*. Ontario Problem Gambling Research Centre (OPGRC).

Glozah, F.N., Tolchard, B., & Pevalin, D.J. (2021). *Participation and attitudes towards gambling in Ghanaian youth: an exploratory analysis of risk and protective factors*. *International journal of adolescent medicine and health*, 33(4), 20180175.

Littlejohn, S.W., Foss, K.A., & Oetzel, J.G. 2017. *Theories of Human Communication*. Eleventh Edition. Long Grove, IL: Waveland Press, Inc.

PPATK (26 Juli 2024). *Gawat! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online*. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>

UNICEF, G. (2021). *A study of adolescents' knowledge, attitude and practice to gambling*. New York: UNICEF.



Tantangan dan Peluang Bullion Bank dalam Memperkuat Industri Emas Nasional

Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat industri emas dunia, setidaknya di Asia Tenggara. Wajar jika kemudian industri bullion, yang mencakup perdagangan, penyimpanan, dan pengelolaan logam mulia –khususnya emas dan perak, kini menjadi fokus utama dalam pengembangan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini punya peran penting dalam memperkuat hilirisasi emas dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Terlebih, setelah pemerintah membentuk Bullion Bank, yang diharapkan tak hanya memperkuat industri emas domestik, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan Indonesia.

Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap

Anggota Dewan Komisiner OJK, meyakini industri emas Indonesia dapat tumbuh dengan pesat dengan adanya dukungan dari bullion bank nasional.

“Sebagai regulator, OJK berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang aman, transparan, dan berkelanjutan bagi sektor bullion. Ini adalah bagian dari upaya kami mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tegas Agusman dalam seminar bertajuk **Bullion Financial Services in Indonesia: Opportunities and Challenges** di Jakarta.

Meski potensinya besar, tantangan pengembangan industri bullion Indonesia juga tidaklah mudah. Isu utama yang mengemuka antara lain infrastruktur pasar yang belum matang, regulasi yang masih terbatas, serta perlindungan konsumen yang masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, Agusman menekankan perlunya pembentukan Dewan Emas Indonesia (*Gold Council*) untuk mengawasi dan mengembangkan kebijakan serta regulasi yang terkait dengan industri ini, seraya memperkuat kerja sama antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan pelaku industri.

“Keberhasilan sektor bullion ini akan sangat bergantung pada seberapa kuat ekosistem ini kita bangun. Regulasi dan perlindungan konsumen harus menjadi prioritas,” tambahnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), OJK bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan usaha bullion. Kegiatan ini mencakup penyimpanan, pembiayaan, perdagangan, kustodian, dan layanan terkait lainnya yang hanya dapat dilakukan oleh lembaga jasa keuangan berizin OJK.

Ahmad Nasrullah, Kepala Departemen Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Khusus OJK



Sumber Gambar: Antara News

mengungkapkan, untuk mengatur sektor bullion, lembaganya telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) yang menetapkan prinsip tata kelola, manajemen risiko, serta aspek kehati-hatian sesuai amanat UU P2SK.

"Dengan sistem yang baik, kami ingin sektor bullion Indonesia tumbuh berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada perdagangan emas, tetapi juga membangun ekosistem yang saling mendukung antara industri pertambangan, manufaktur, dan jasa keuangan," ujarnya.

Dengan memperkenalkan konsep *Gold Saving*, *Gold Financing*, *Gold Trading*, dan *Custodian*, Ia berharap industri bullion nasional dapat berkembang seiring dengan hilirisasi industri pertambangan, manufaktur, dan jasa keuangan. "Pegadaian adalah yang pertama mendapatkan izin usaha bullion. Kami berharap lebih banyak lagi lembaga keuangan yang bergabung sehingga akan tercipta ekosistem yang lebih luas," tambahnya.

DIVERSIFIKASI PRODUK

Telisa Aulia Falianty, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), juga turut memberikan pandangannya tentang potensi pengembangan bullion bank sebagai lembaga yang memungkinkan monetisasi emas yang selama ini hanya disimpan. "Bullion bank bukan hanya sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai katalis untuk memperkuat ekosistem keuangan kita. Ini bisa membantu meningkatkan inklusi keuangan dan mempercepat *financial deepening*," jelasnya.

Menurut Telisa, bullion bank dapat mempercepat penetrasi layanan keuangan, meningkatkan *financial deepening*, serta mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Selain itu, bullion bank juga bisa meningkatkan likuiditas dan memberikan akses kredit yang lebih luas, terutama bagi UMKM, dengan menggunakan emas sebagai jaminan.

Namun, Telisa menekankan, perlu standarisasi dan pengujian untuk memastikan kualitas emas dan keamanannya. Infrastruktur logistik emas, seperti vaulting dan distribusi emas, juga harus diperkuat agar dapat memenuhi standar internasional. Selain itu, peran digitalisasi dan inovasi produk keuangan berbasis emas, seperti *crypto gold*, *Sovereign Gold Bond (SGB)*, dan *Exchange-Traded Fund (ETF)* juga diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas dan memperluas pasar bullion Indonesia.

"Distribusi dan logistik emas, serta standarisasi pengujian emas, harus jadi perhatian utama jika kita ingin membangun sistem yang lebih besar dan lebih inklusif," tegas Telisa.

Shaokai Fan, Head of Asia-Pacific & Global Head of Central Banks World Gold Council, menyoroti posisi Indonesia dalam pasar emas global. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 45 dalam *official reserve asset* dari sisi kepemilikan emas oleh bank sentral, masih jauh dibandingkan dengan negara-negara BRICS seperti China, Rusia, dan India.

Menurutnya, regulasi baru yang diterapkan OJK dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan cadangan emas nasional serta mengurangi ketergantungan pada impor emas. "Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam pasar emas global," ujarnya.

Selain pasar bullion dan derivatif, sektor aset digital yang mencakup *cryptocurrency* dan *blockchain* juga tengah menjadi perhatian besar. Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK, menegaskan bahwa sektor ini memiliki potensi besar, namun memerlukan regulasi yang jelas dan efektif untuk menjaga stabilitas pasar.

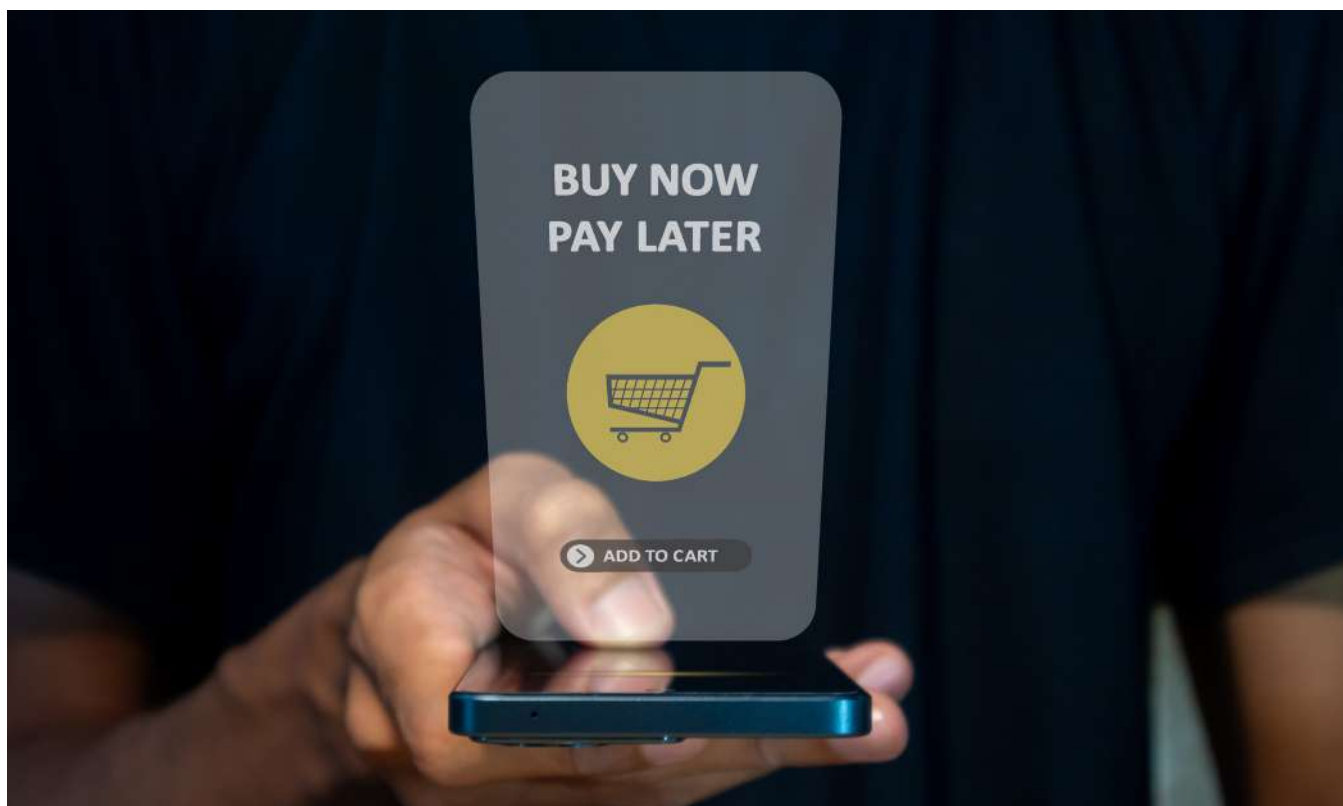
"Aset digital semakin diminati, dan kami berkomitmen untuk menciptakan regulasi yang dapat memfasilitasi pertumbuhannya secara aman dan inklusif," jelasnya.

Membangun Ekonomi 2025 dengan Keuangan yang Stabil dan Inklusif

Pada tahun 2025, sektor jasa keuangan Indonesia dihadapkan pada tantangan global yang cukup kompleks. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap optimistis dan menegaskan komitmennya untuk memperkuat stabilitas dan inklusivitas sektor jasa keuangan guna mendukung program prioritas pemerintah dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.

Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisiner OJK, menjelaskan bahwa normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju berpotensi mengganggu arus modal dan nilai aset keuangan. Tidak hanya itu, divergensi pemulihan ekonomi antarnegara dan fragmentasi perdagangan global, yang kini lebih dipengaruhi oleh politik daripada ekonomi, turut memperburuk situasi.

"Isu dalam negeri, seperti peningkatan tenaga kerja sektor formal dan pemulihan daya beli masyarakat menengah ke bawah, juga menjadi tantangan utama," ujar Mahendra dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (11/02/2025). Acara tersebut dihadiri oleh ratusan pelaku industri dan sejumlah pejabat Kementerian/Lembaga, yang turut memberikan kontribusi pada pembangunan sektor keuangan.





Sumber Gambar: Antara, 11 Februari 2025

Meski demikian, sektor keuangan Indonesia menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tengah ketidakpastian ekonomi 2024. Total penyaluran kredit perbankan tercatat sebesar Rp7.827 triliun atau tumbuh 10,39 persen, dengan risiko kredit yang relatif terjaga. Selain itu, sektor pembiayaan dan *fintech* lending juga mengalami pertumbuhan signifikan, masing-masing mencapai Rp503,43 triliun atau tumbuh 6,92 persen dan Rp77,02 triliun atau melonjak 29,14 persen.

Layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL) juga mencatatkan pertumbuhan signifikan, dengan pembiayaan perbankan mencapai Rp22,12 triliun atau tumbuh 43,76 persen dan perusahaan pembiayaan sebesar Rp6,82 triliun atau meningkat 37,6 persen.

Di pasar modal, penghimpunan dana mencapai Rp299,24 triliun, melampaui target Rp200 triliun, dengan jumlah investor meningkat 66 persen dalam lima tahun terakhir menjadi 14,87 juta investor.

Semua indikator tersebut menegaskan bahwa sektor keuangan Indonesia memiliki pondasi yang kuat dan tetap menarik meskipun menghadapi berbagai tantangan eksternal maupun internal yang penuh ketidakpastian.

Namun, Mahendra menegaskan, OJK tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan. Lebih dari itu, OJK berupaya memastikan sektor jasa keuangan memiliki peran besar dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, seperti ketahanan pangan, pendidikan, dan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. OJK juga berkomitmen memperkuat sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mengedukasi masyarakat melalui peningkatan literasi keuangan serta memperluas ekosistem investasi.

"Kami percaya sektor jasa keuangan Indonesia akan terus menunjukkan angka pertumbuhan positif pada 2025, berkat kebijakan-kebijakan yang telah kami rancang untuk memperkuat daya tahan sektor ini," ujar Mahendra.

OJK memproyeksikan sektor keuangan akan tumbuh stabil pada tahun 2025, dengan aset perbankan diperkirakan tumbuh antara 9-11 persen, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 6-8 persen, dan piutang pembiayaan usaha tumbuh 8-10 persen. Penghimpunan dana di pasar modal juga diharapkan mencapai Rp 220 triliun. Selain itu, aset-aset lainnya, seperti asuransi, dana pensiun, dan penjaminan, diproyeksikan akan tumbuh antara 6-11 persen.

Untuk merealisasikannya, OJK memperkenalkan sejumlah kebijakan strategis, terutama untuk memperkuat daya tahan sektor keuangan sekaligus mendukung program-program prioritas pemerintah.

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, OJK meluncurkan dua inisiatif penting. Pertama, Indonesia (IASC), yang berfokus menangani penipuan di sektor keuangan. Kedua, Sistem Informasi Pelaku di Sektor Keuangan (SIPELAKU), yang dirancang untuk meningkatkan transparansi pelaku sektor keuangan.

Selain itu, OJK menetapkan empat kebijakan prioritas utama, yaitu optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam pembiayaan sektor pangan, kesehatan, dan perumahan; pengembangan sektor keuangan inklusif dan berkelanjutan; penguatan kapasitas pengawasan; serta perlindungan konsumen yang lebih baik.

Melalui sinergi yang kuat antara regulator, industri, dan pemangku kepentingan, OJK berkomitmen memastikan pertumbuhan sektor keuangan Indonesia terus berkelanjutan dan mampu mendukung perekonomian nasional.

"Sektor keuangan yang inklusif dan transparan akan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang merata. Kami percaya bahwa dengan terus berinovasi, sektor keuangan Indonesia dapat menciptakan ekosistem yang lebih kuat dan lebih adil," jelas Mahendra Siregar.

Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN)

PERBANKAN				
INTERMEDIASI				
	Des-23	Okt-24	Nov-24	Des-24
Kredit (Rp T)	7,090	7,657	7,717	7,827
% Yoy	10.38	10.92	10.79	10.39
% Ytd	10.38	7.99	8.84	10.39
% Mtm	1.79	1.02	0.79	1.42
% Growth YoY				
Kredit Modal Kerja (KMK)	10.05	9.25	8.92	8.35
Kredit Investasi (KI)	12.26	13.63	13.77	13.62
Kredit Konsumsi (KK)	9.10	11.01	10.94	10.61
DPK (Rp T)	8,458	8,751	8,836	8,837
% Yoy	3.73	6.74	7.54	4.48
% Ytd	3.73	3.47	4.47	4.48
% Mtm	2.94	0.35	0.97	0.02
LDR	83.83	87.50	87.34	88.57
PERMODALAN				
	Des-23	Okt-24	Nov-24	Des-24
CAR (%)	27.65	27.02	26.87	26.69

PROFITABILITAS				
	Des-23	Okt-24	Nov-24	Des-24
NIM (%)	4.81	4.61	4.59	4.62
ROA (%)	2.74	2.73	2.69	2.69
PROFIL RISIKO				
	Des-23	Okt-24	Nov-24	Des-24
Risiko Kredit				
NPL Gross (%)	2.19	2.20	2.19	2.08
NPL Net (%)	0.71	0.77	0.75	0.74
LaR (%)	10.94	9.94	9.82	9.28
Risiko Pasar				
PDN (%)	1.44	1.39	2.31	1.34
Risiko Likuiditas				
Alat likuid (Rp T)	2,430	2,239	2,260	2,262
AL/NCD(%)	127.07	113.64	112.94	112.87
AL/DPK(%)	28.73	25.58	25.57	25.59
LCR	220.18	222.70	213.07	213.23
NSFR*	134.04			128.75

*data kuartal

Sumber: OJK 2025

PENGEMBANGAN PASAR DERIVATIF

OJK juga menegaskan pentingnya reformasi besar untuk memperkuat pasar derivatif Indonesia, terutama pasca-pengalihan kewenangan pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke instansinya per 10 Januari 2025.

“Kami berkomitmen untuk memastikan transisi pengawasan derivatif keuangan berlangsung lancar dan tanpa disrupsi, yang tentunya membutuhkan sinergi dan kerja sama erat dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujar Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.

Sebagai bagian dari transisi, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur derivatif keuangan berbasis efek serta POJK Nomor 12 Tahun 2025 untuk memastikan transisi berjalan lancar tanpa gangguan terhadap industri. Dalam dua tahun masa transisi, pelaku pasar diwajibkan mengajukan persetujuan prinsip dalam empat bulan pertama dan memperoleh izin usaha dalam dua tahun. OJK juga mengembangkan sistem digitalisasi, seperti SPRINT dan GAPURA, guna meningkatkan efisiensi perizinan dan pelaporan.

Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, dan Transaksi Efek OJK, Made Bagus Tirtayasa, menambahkan, pengalihan pengawasan derivatif dari Bappebti ke OJK telah sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). “Instrumen efek dan pasar uang berada di bawah OJK, sementara valuta asing tetap di bawah Bank Indonesia,” tegasnya.

Perusahaan yang telah memiliki izin dari Bappebti diwajibkan mengajukan izin prinsip ke OJK sebelum Mei 2025 dan memperoleh izin usaha dalam dua tahun. Hingga saat ini, 16 pihak telah mengajukan izin prinsip, termasuk mayoritas Self-Regulatory Organizations (SRO).

“Kami berkomitmen untuk memastikan transisi pengawasan derivatif keuangan berlangsung lancar dan tanpa disrupsi, yang tentunya membutuhkan sinergi dan kerja sama erat dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujar Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.

“Regulasi baru ini bertujuan untuk memperluas cakupan regulasi, mencakup perdagangan berjangka komoditi dan memperkuat perlindungan investor,” jelas Made.

Hadir dalam kesempatan tersebut, David Lutz, Senior Vice President Equities Product Development Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), memaparkan bagaimana Hong Kong mengembangkan pasar derivatifnya melalui inovasi dan regulasi yang baik.

“Setelah krisis keuangan global, pasar derivatif berkembang pesat dengan tren utama seperti peningkatan perdagangan ritel, pertumbuhan perdagangan opsi, dan munculnya opsi jangka pendek,” ujar Lutz.

Menurut Lutz, pengalaman Hong Kong menunjukkan bahwa keberhasilan pasar derivatif bergantung pada diversifikasi partisipan, regulasi yang jelas, serta inovasi produk. “Regulator harus bekerja sama dengan pelaku pasar untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan kompetitif,” tambahnya.

OJK berkomitmen memastikan transisi ini berjalan lancar dengan tetap memperkuat perlindungan investor. Kolaborasi berbagai pihak diharapkan dapat menjadikan pasar derivatif keuangan lebih stabil, transparan, dan berdaya saing tinggi. “Kami akan terus mengeksplorasi dan mengembangkan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor derivatif ini,” pungkas Inarno.



Kelas Jurnalis PERBANAS Bekali Wartawan Materi Dasar Perbankan

Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) membuka kelas bagi para jurnalis untuk mendalami dan mempelajari serba-serbi industri perbankan. Kelas Jurnalis PERBANAS (KJP) untuk pertama kalinya diselenggarakan pada 17 Februari 2025 di Jakarta, yang diikuti oleh belasan wartawan pemula dari berbagai media massa nasional.

Mengangkat tema “Dari Angka ke Narasi: Memahami Indikator Ekonomi dan Keuangan Bank”, KJP perdana membekali jurnalis dengan materi dasar dan tips analisa laporan keuangan serta faktor-faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja bank.

Wakil Ketua Umum PERBANAS Taswin Zakaria menilai, jurnalis perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep dasar perbankan, serta berbagai praktik dan regulasi yang berlaku, terutama di tengah perkembangan industri yang pesat dan kompleksitas kebijakan yang terus berubah. Ia berharap KJP dapat memberikan landasan yang kuat bagi jurnalis untuk

memahami berbagai terminologi, instrumen keuangan, dan dinamika yang terjadi dalam dunia perbankan.

“Dengan pengetahuan yang lebih mendalam, kami berharap jurnalis dapat mengasah keterampilannya dalam menyaring, mengolah, dan menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan berimbang mengenai isu-isu yang berkaitan dengan sektor perbankan. Ini sangat penting untuk menghindari kesalahan informasi yang dapat menyesatkan publik atau menimbulkan keresahan yang tidak perlu,” tutur Taswin.

Materi dasar perbankan dan tips menganalisa laporan keuangan bank diberikan langsung oleh Dio Alexander Samsoeri, yang merupakan Wakil Bendahara PERBANAS. Menurutnya, para pekerja media yang meliput isu-isu perbankan perlu memahami pengaruh faktor-faktor ekonomi makro dan mikro, seperti suku bunga dan inflasi, terhadap kinerja keuangan bank.

"Penting bagi jurnalis untuk memahami dinamika dan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global yang dapat mempengaruhi sektor perbankan. Pemahaman ini akan membantu jurnalis dalam menganalisis bagaimana bank merespons perubahan eksternal yang dapat mempengaruhi likuiditas, kredit, dan pertumbuhan ekonomi domestik," tutur Dio.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PERBANAS Anika Faisal menambahkan, dengan analisa dan ulasan yang tepat, pemberitaan media tentang perbankan tidak hanya akan lebih bernilai, tetapi juga lebih berdampak positif bagi masyarakat, bankir, maupun regulator. Kepedulian ini yang mendorong PERBANAS untuk menyelenggarakan KJP, yang diharapkan juga dapat semakin mempererat hubungan antara PERBANAS dan media, serta memungkinkan jurnalis untuk memperluas jaringan dan mendapatkan akses informasi yang lebih akurat dan terpercaya.

"Kami berharap program ini tidak hanya berhenti di sini. Semoga Kelas Jurnalis PERBANAS bisa berkelanjutan, dengan topik bahasan yang disesuaikan dengan dinamika industri perbankan dan kebutuhan jurnalis yang selalu haus akan informasi aktual," tandas Anika.



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK HIBANK INDONESIA

Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini PT Bank Hibank Indonesia mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Tahun 2024 sebagai berikut :

Tahun 2024 Rp 567.994.064,00

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2024 sebagai lampiran.

PERBANAS dan BI Sulut Buka Puasa Bersama dengan Puluhan Anak Panti Asuhan

Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) Sulawesi Utara (Sulut) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut mengadakan buka puasa bersama puluhan anak-anak panti asuhan di Ruang Tondano Kantor Perwakilan BI Sulut, Rabu (19/3/2025). Nuansa keceriaan pun tampak dari anak-anak dari Panti Asuhan Al Ikhwan dan Siti Hadijah saat menikmati menu buka puasa bersama yang dihidangkan secara prasmanan.

Ketua PERBANAS Sulut Rilly Pua mengatakan pada tahun ini pengurus PERBANAS Sulut sengaja mengundang anak-anak panti asuhan karena ingin berbagi kebahagiaan Ramadan. Mereka sebenarnya hendak mengadakan acara ini di salah satu rumah makan, tapi terpikir untuk mengadakannya di Kantor BI supaya anak-anak panti asuhan dapat menikmati menu buka puasa secara prasmanan. Ide itu juga yang langsung disetujui Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut Andry Prasmuko.

"Jadilah kami mengadakannya di Kantor BI. Anak-anak palingan baru kali ini datang melihat kemegahan kantor BI. Selain itu mereka bisa makan puas, boleh tambah sesuka hati mereka. Momen seperti ini kan belum tentu dirasakan mereka setiap harinya," jelas Rilly kepada Exposenews.id.

Selain makan bersama, PERBANAS turut memberikan santunan berupa uang tunai. Anak-anak panti juga diberikan *goody bag* berisikan *tumbler*, *lunch box*, dan sejumlah *snack*.

"Semoga bantuan ini berkenan dan mari kita sambut Idul Fitri dengan penuh sukacita dan kebahagiaan," pungkasnya.

Sementara, Andry Prasmuko mengapresiasi apa yang dilakukan PERBANAS Sulut. Dia berharap PERBANAS dapat membuka kegiatan kemanusiaan lebih banyak lagi.

"Satu hal yang sangat baik buka puasa bersama dengan anak-anak panti asuhan. Kita merasakan kegembiraan bersama mereka. Ide yang sangat baik sekali, dan di sini kami menyediakan tempat, semoga berkah ya. Saya berharap PERBANAS sering-sering buat kegiatan seperti ini, jangan cuma pikirkan profit saja," tutup dia.





CEO Forum

Di awal tahun 2025 tepatnya 22 Januari 2025 kegiatan PERBANAS diawali dengan CEO Forum., Bapak Dian Ediana Rae selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK hadir dalam acara tersebut untuk memberikan *keynote speech*. CEO Forum kali ini bertema "*Banking Beyond Growth: Powering a Sustainable and Inclusive Economy for 2025 Onward*"



CFO Forum

CFO Forum PERBANAS pada 27 Februari 2025 bertempat di Auditorium Plaza Mandiri dengan Tema “Pemaparan PSPK 1 dan PSPK 2: Tantangan, Peluang, dan Strategi Adaptasi di Era Baru Transparansi Industri Perbankan”. Hadir dalam kesempatan tersebut Bapal Henry Rialdie, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK dan Ibu Rosita Uli Sinaga, Ketua Dewan Pemantai Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia.





Kegiatan KOMITE MASYARAKAT PERBANKAN PEDULI (KMPP) PERBANAS

KMPP PERBANAS melalui PERBANAS Pusat dan PERBANAS Kupang telah menyerahkan bantuan berupa 20 unit komputer bagi SMP Negeri 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 11 Maret 2025. Bantuan ini diberikan dalam rangka kepedulian dan sumbangsih PERBANAS di bidang Pendidikan dan sosial. Bantuan diserahkan oleh Bapak Dio Alexander Samsoeri selaku Wakil Bendahara PERBANAS kepada Bapak Dumul Djami selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.



Selamat Merayakan

Idul Fitri

1446 H



PERBANAS
PERHIMPUNAN BANK NASIONAL